

ANALISIS PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN FAMILISME DI PEDESAAN

Reno Francius Simanullang¹, Ruspiana Hutagaol²,
Zenfitri R. Situmorang³, Sugiharto⁴
Pendidikan Dasar Universitas Negeri Medan
Alamat e-mail :¹renosimanullang40@gmail.com, hruspiana@gmail.com²,

ABSTRACT

This article explains the politics of familism in Indonesia, especially in the regions and tries to answer the question of how familism is formed and what its implications are for village development. The method used is qualitative-descriptive which is analyzed using familism theory. This article concludes that although kinship relations are quite strong in the village government structure, their impact on village development is not good, as evidenced by slow services and unrealized development as well as the existence of village officials who abuse their position in serving the community to take action. take care of administration such as personal data. and implementing a system that is in accordance with village apparatus regulations, not an appropriate system, especially regarding the use of village funds. The point is that kinship politics is not positive and in any case will always give rise to prolonged polemics and hinder other communities that have potential.

Keywords: Familism, Politics, Village Governmentd

ABSTRAK

Artikel ini menjelaskan tentang politik familisme di Indonesia khususnya di daerah dan berusaha menjawab pertanyaan bagaimana bentuk familisme dan apa implikasinya bagi pembangunan Desa. Metode yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif yang dianalisis dengan menggunakan teori familisme. Artikel ini berkesimpulan bahwa meskipun kekerabatan terjalin cukup kuat dalam struktur pemerintahan Desa akan tetapi dampak yang diberikan terhadap pembangunan desa kurang baik dengan dibuktikan pelayanan yang lambat dan pembangunan dan tidak terealisasi serta adanya perangkat desa yang menyalah gunakan jabatannya dalam melayani masyarakat untuk mengurus administrasi seperti data diri dan menjalankan sistem yang sesuai aturan perangkat desa bukan sistem yang selayaknya khususnya terkait penggunaan dana desa. Poinnya adalah bahwa politik kekerabatan tidaklah positif dan bagaimanapun akan selalu memberikan polemik dan akan berkepanjangan serta menghambat masyarakat lain yang mempunyai potensi.

Kata Kunci: Familisme, Politik, Pemerintah Desa

A. Pendahuluan

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, sebuah kedaulatan yang dimiliki sebuah

negara sangat bergantung pada lembaga yang ada di negara tersebut. Kedaulatan rakyat adalah lembaga yang mempunyai sebuah kekuatan

yang bersifat sosial politik, sebuah keputusan yang ada di Indonesia serta beragam golongan yang dikategorikan tercantum dalam tugas-tugas yang ada di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Agar pemerintahan mampu menyelenggarakan pendidikan politik bagi rakyat, para pejabat pemerintah harus meyakini terlebih dahulu tentang kebenaran prinsip kedaulatan rakyat sebagai dasar Indonesia merdeka (Andri, 2017)). Kedaulatan ditentukan dengan bagaimana masyarakat bertindak dan merupakan tanggung jawab majelis permusyawaratan rakyat untuk membantu tercapainya hal tersebut. Sistem pemerintahan mengambil peran dan andil yang besar dalam kelancaran perputaran roda pemerintahan (Noviati, 2013). Sistem pemerintah berfungsi untuk membagi tugas serta hak yang diperoleh dari masing-masing jabatan pada pemerintah. Sistem pemerintahan presidensial dalam hal ini, Presiden sebagai kepala negara yang memiliki kuasa dan wewenang dalam menjalankan sistem penyelenggaraan dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat dan kemajuan negara. Hal ini ditegaskan dalam

Pasal 4 Ayat 1 UUD 1945 menyebutkan “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.

Sistem negara didefinisikan sebagai hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif (Soemantri, 1976). Pada struktur yang ada di Indonesia, tidak hanya lembaga eksekutif maupun legislatif yang juga mempunyai fungsi sebagai lembaga yudikatif adalah MA atau yang dikenal dengan Mahkamah Agung. Sebagai sebuah lembaga yang harus menegakan keadilan maka Mahkamah Agung berperan dalam membutuhkan ketegasan pada Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan yang dimiliki oleh hakim membutuhkan sifat tegas sebab Mahkamah Agung merupakan sebuah lembaga yang bertugas menegakan keadilan dan mempunyai fungsi independensi.

Kekuasaan dibagi menjadi tiga kategori yang dikenal dengan istilah trias politica (Bratakusumah, 2018). Kekuasaan tersebut mulai dari kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, hingga kekuasaan yudikatif berdasarkan dengan prinsip keseimbangan yang terdapat sejak

undang-undang dirumuskan hingga undang-undang disahkan. Tetapi, dibutuhkan adanya upaya untuk menyempurnakan aturan serta batasan kekuasaan agar kebijakan yang dilakukan oleh Presiden tidak semena-mena. Kemudian, dibutuhkan adanya tanggung jawab DPR dalam menjalankan tugasnya seperti melaksanakan tugasnya sesuai dengan undang-undang, melaksanakan fungsi untuk mengawasi penerapan kekuasaan pada pemerintahan dan fungsi lembaga yang menjadi waktil rakyat. Oleh sebab itu, perlu adanya pemaparan yang jelas berkaitan dengan tugas yang dimiliki MPR untuk melakukan pemberdayaan kepada lembaga di Indonesia sesuai dengan konstitusi sehingga hal ini dikenal sebagai kedaulatan rakyat. Dari ketiga sistem kekuasaan ini banyak terdapat sistem pemerintahan familisme dimana banyak kerabat-kerabat yang menjadi bagian dalam administrasi yang dijalankan atau bahkan menjadikan kerabat-kerabat menjadi penerus untuk ke esokan harinya sehingga tidak beralih kepada orang lain yang sebenarnya lebih ber potensi dan indikatornya hanya kepada familisme bukan kepada potensi.

Familisme tentu terdapat di setiap sistem pemerintahan, baik itu pusat, provinsi, kota.kabupaten hingga pada desa. Namun masyarakat lebih mengetahui tentang sistem pemerintahan familisme itu di desa karena masyarakat lebih sering berjumpa dengan perangkat desa hingga kecamatan, walaupun tak jarang juga masyarakat bertemu dengan perangkat kabupaten untuk mengurus administrasi seperti data diri.

Sistem pemerintahan yang terjadi dari dulu hingga saat ini adalah pengaruh dari sebuah politik, yang dimana segala sesuatunya diatur oleh politik, karena kebijakan-kebijakan yang ada tentu melalui dari sebuah politik seperti aturan pekerjaan yang ada, harga barang yang ada hingga pemakaian alat IT dan media sosial yang ada batasannya.

Tulisan ini menjelaskan tentang praktik politik familisme yang memang sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat, khususnya di daerah pedesaan terkhusus lagi dalam pengurusan administrasi seperti contoh tata kelola desa. Studi tentang familisme atau politik kekerabatan telah banyak dibidik para sarjana di Indonesia, misalnya Hendi Sanda

Putra (2017), Pawennari Hijjang dan Lia Amelia (2019), dan Nurul Farra Yhasmid (2020). Secara umum studi yang ada menunjukkan bahwa struktur jaringan kekerabatan dalam kepemimpinan terutama di tingkat desa berpusat pada kepala desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Untuk itu diperlukan kajian sejauh mana relevansi dari klaim kesarjanaan yang ada bahwa kepala desa adalah episentrum dari praktik familisme. Politik familisme atau politik kekerabatan dalam konteks Indonesia memiliki kecenderungan menggunakan sumber daya kekuasaan baik formal maupun informal. Tidak jarang pola ini banyak dipraktikkan dengan cara menekan perangkat yang bekerja dalam institusi pemerintahan, namun pola tersebut pada banyak kasus terbukti ampuh dalam mencapai atau mempertahankan kekuasaan terkhusus di dalam pemerintahan desa. Pada aspek kebijakan, politik kekerabatan biasanya di pengaruhi oleh adanya dominasi kekuasaan sehingga mampu mempengaruhi proses pembuatan kebijakan atau keputusan politik. Di sisi lain mereka sangat mudah mendapatkan kekuasaan ketika mereka bertarung

dalam memperebutkan kekuasaan, hal ini dikarenakan akses terhadap modal dan pengaruh keluarga dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dalam politik familisme atau politik kekerabatan untuk menjaga hubungan politiknya mereka sering kali melakukan bagi-bagi jabatan untuk melanggengkan kekuasaannya, hal seperti itu sering kali ditemukan baik di skala nasional maupun lokal (Susan, 2017).

Fenomena praktik politik familisme banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia (Anggra & Suryanef, 2022; Upe, Nur, & Suaib, 2022; Mirsa & Imran, 2023; Yhasmid, 2020; Alam, 2018; Pahruddin, 2018; Poma, 2016; Amran, Limba, & Roslan, 2018). Salah satunya adalah di Desa Lembang Lohe, Bulukumba. Praktik politik kekerabatan yang terjadi yakni adanya dominasi kekerabatan dalam struktur pemerintahan desa. Praktik politik kekerabatan ini tidak menutup kemungkinan memberi dampak negatif pada pengelolaan pemerintahan desa, jika pengangkatan perangkat desa dilakukan hanya karena adanya hubungan keluarga dan tanpa memperhatikan kapasitas yang

dimiliki. Tentu hal ini akan mempengaruhi cara pelayanan dan pembangunan yang kurang baik di pemerintahan desa. Secara umum, praktik politik kekerabatan dapat menutup peluang untuk melahirkan pemimpin yang baik, atau dapat menumbuhkan bentuk baru tirani yang memberi jalan kepada anggota keluarga dalam struktur kekuasaan. Mengisi posisi pemerintahan seringkali bukan merupakan praktik profesional, tetapi keakraban politik merupakan persyaratan yang sangat menentukan untuk mengisi posisi jabatan. Praktik politik kekerabatan juga merupakan bentuk awal dari penyelewengan kekuasaan yang berdampak buruk terhadap tata kelola desa, salah satunya adalah lahirnya korupsi dan nepotisme karena adanya dominasi dalam struktur kekuasaan sehingga dapat melemahkan check and balance pada pelaksanaan tugas-tugas dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan dan hal ini tidak menutup kemungkinan sehingga terjadilah penyelewengan kekuasaan dalam pemerintahan desa. Berdasarkan penjelasan-penjelasan dalam latar belakang masalah, maka terdapat argumen terkait mengapa dilakukan penelitian ini dan oleh

karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk familisme dan dampak keberadaan familisme dalam sistem pemerintahan di Indonesia khususnya di daerah pedesaan.

Pedesaan adalah kawasan strategis untuk penyelewengan kekuasaan dan juga kawasan strategis mengelola desa dengan bebas dengan istilah lain adalah tata kelola desa, karena pengawasan ke desa kurang dari pemerintah pusat dan sehingga perangkat desa bergerak bebas untuk memainkan peran-peran struktur dan administrasi desa dengan menggunakan sistem pemerintahan desa yang mereka jalankan.

Maka, Untuk mencapai tujuan tersebut, maka kami menggunakan konsep familisme Adela Garzon sebagaimana dikutip oleh Wasisto Raharjo Djati untuk menguraikan familisme di Desa Lembang Lohe, Bulukumba. Dalam kajian ilmu sosial dan politik, familisme sebagai budaya politik diartikan sebagai ketergantungan yang terlalu besar pada ikatan keluarga, yang melahirkan kebiasaan menempatkan keluarga dan ikatan kekerabatan pada kedudukan yang lebih tinggi dari pada

kewajiban sosial lainnya. Dalam pengertian lainnya, familisme juga dipahami sebagai *new friendly request*, yakni dorongan psikologis bagi seseorang untuk dapat berkarir di dalam dua ranah yakni publik sebagai birokrat dan privat sebagai korporat-swasta (Garzon, 2000). Ada tiga varian familisme (Djati, 2013), yaitu; Pertama, familisme. Familisme sebuah dinasti politik yang hanya didasarkan pada kekerabatan langsung (hubungan) dalam keluarga dan ikatan perkawinan (perkawinan) dengan klan lain. Posisi dengan silsilah politik yang kuat menguntungkan bagi mereka yang memiliki silsilah yang lemah.

Kedua, quasi familisme. Model ini didasarkan pada kasih sayang kekeluargaan dan sikap solidaritas dalam struktur kekuasaan. Alih-alih dimaknai sebagai afeksi, afeksi literal dimaknai sebagai bentuk orientasi kebijakan keluarga berdasarkan lokalitas, lingkungan, dan tribalisme, mirip dengan keluarga. Dengan kata lain, dimensi dinasti politik ini bukan lagi ranah keluarga inti, bercabang ke keluarga lain dengan sistem kekerabatan yang dibangun secara artifisial, bukan keturunan darah. Dengan demikian, dalam model semi-

keluarga, setiap keluarga berusaha mengidentifikasi dirinya melalui simbol tertentu untuk mendapatkan legitimasi dari anggota keluarga lainnya. Jadi termobilisasi dalam semi-familialisme itu sendiri adalah proses solidaritas anggota formal dan informal. Akibatnya, keluarga setengah berkembang menjadi kekuatan oligarki yang mampu mempengaruhi semua bidang kehidupan.

Ketiga, egoisme-familisme. Model dinasti politik ini didasarkan pada pemenuhan aspek fungsionalisme dibanding hanya menuruti garis keturunan maupun ikatan darah. Konteks egoisme ini dapat dipahami dalam dua hal, yakni dari segi kepala daerah dan masyarakat. Egoisme dari kepala daerah pada dasarnya sama dengan konsepsi teori sebelumnya yakni kecenderungan mendahulukan keluarga dari pada publik dalam pengisian posisi jabatan publik maupun suksesi pemerintahan.

B. Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif sendiri merupakan metode dengan pola kontekstual dengan menggunakan

manusia sebagai alat dan umumnya disesuaikan dengan situasi rasional dalam mengumpulkan informasi yang bersifat kualitatif (Moleong, 2001). Untuk memperoleh data yang relevan, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun yang diwawancarai adalah masyarakat-masyarakat yang berada di desa. Adapun langkah-langkah analisis data adalah reduksi data. Ini merupakan suatu bentuk analisis yang digunakan untuk mengklarifikasi, mengklasifikasikan, mengarahkan, dan menghapus data yang tidak perlu dengan mengatur informasi dengan cara ini. Setelah itu membandingkan data tersebut satu sama lain. Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi (Yusuf, 2017).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Indonesia adalah negara yang dinilai memiliki sistem pemerintahan yang dikategorikan sebagai sistem presidensial (Thahir, 2019). Hal

tersebut sesuai dengan persetujuan dari bangsa yang dikenal dengan founding fathers yang dikemukakan pada sidang BPUPKI atau dikenal dengan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk tanggal 29 Mei hingga 1 Juni serta 10 Juli hingga 17 Juli tahun 1945 dan yang utama, sistem ini memiliki dasar yang berkaitan dengan asas untuk memisahkan beragam kekuasaan serta terdapat semangat yang membara untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dan tertib.

Disamping itu fenomena politik familisme sudah ada sejak masa pra kolonial kemudian dilanjutkan pada masa Orde Baru. Hubungan familisme dengan kekuasaan sudah sejak lama melekat pada kehidupan perpolitikan di Indonesia yang berlangsung secara turun temurun. Pada hakikatnya jaringan kekerabatan dianggap suatu hal yang sangat efektif dalam memperoleh kekuasaan. Untuk memperkuat kekuasaan para oknum tertentu membuat kekuatan yang berasal dari keluarga ataupun kerabat yang dianggap dapat memperkuat pengaruh kekuasaannya. Jadi tidak heran jika para pemimpin menempatkan keluarga atau kerabatnya dalam jabatan-jabatan

yang strategis. Tentu hal ini memberikan keuntungan bagi penguasa dalam menjalankan kepentingan pribadi dan kelompoknya, karena adanya dominasi kekerabatan dalam struktur kekuasaan (Siswandani & Prasetyo, 2022).

Fenomena politik familisme yang dapat dilihat pada aspek rekrutmen perangkat desa. Hampir semua perangkat desa yang direkrut adalah kerabat kepala desa, sisanya adalah kroni. Pola rekrutmen perangkat desa semacam ini akan berpengaruh pada aspek pelayanan publik di tingkat desa, dikarenakan tidak didasarkan pada profesionalitas dan kapabilitas pegawai. Padahal, perangkat desa memiliki tanggung jawab dalam mengelola pembangunan desa yang diharapkan mampu memberi kemajuan terhadap desa.

Pada fenomena familisme yang terjadi di Desa terdapat kecenderungan lain yang mengedepankan asas fungsional yang dilakukan kepala desa dalam merekrut kerabatnya dalam jabatan perangkat desa. Hal ini juga berkaitan dengan teori yang dikemukakan Djati dalam bentuk familisme yang ketiga

yaitu egoisme-familisme, model dinasti politik ini didasarkan pada pemenuhan aspek fungsionalisme dan tidak semata-mata mengejar silsilah dan kekerabatan. Hal ini dibuktikan jabatan sekretaris desa diisi oleh kerabat kepala desa yang memiliki kapasitas dalam mengelola administrasi desa (Djati, 2013).

Asal-Usul Politik Familisme dalam Pemerintahan Desa cukup terbilang kuat, hal ini dibuktikan adanya dominasi satu kerabat dalam birokrasi pemerintahan desa. Terlepas dari itu ada beberapa faktor yang mendasari terjadinya politik kekerabatan dalam pemerintahan desa. Adapun faktor yang mendasari terjadinya politik familisme atau politik kekerabatan di Desa Lembang Lohe yaitu: Pertama, modal sosial. Jaringan kekerabatan yang dimiliki kepala desa terbilang cukup luas baik dari dalam daerahnya maupun yang diluar daerah, hal ini di gunakan untuk memperoleh kekuasaan. Aktor-aktor yang berada dalam jaringan kekerabatan juga turut mendapatkan keuntungan dari relasi kekerabatan salah satunya yaitu mendapatkan jabatan sebagai perangkat desa. Tingginya rasa solidaritas kekerabatan membuat modal sosial

yang ada terjaga dengan baik. Kedua, partisipasi. Jaringan keluarga yang dimiliki Kepala Desa akan dapat mencapai tujuan apabila para kerabatnya mampu berpartisipasi dengan baik seperti pada saat menjelang pilkades. Partisipasi kerabat sangat penting untuk mencapai kepentingan bersama. Ketiga, resiprositas. Keterkaitan antar pemangku kepentingan. Adapun resiprositas yang terdapat dalam pemerintahan Desa yaitu pada saat pemilihan kepala desa meminta para kerabatnya untuk mendukungnya, setelah terpilih menjadi kepala desa kemudian menempatkan kerabatnya dalam jabatan perangkat desa. Keempat, kepercayaan. Berdasarkan perasaan yang lebih mempercayai kerabat dari pada non-kerabat dengan tujuan kepala desa ingin menciptakan solidaritas yang tinggi serta keharmonisan dalam ruang kerja pemerintahan desa.

Implikasi Politik Familisme Pada Tata Kelola Pemerintahan Desa ialah adanya ikatan kekerabatan dalam pemerintahan Desa menimbulkan solidaritas yang tinggi dan memperkuat hubungan kekeluargaan dalam lingkungan kerja pemerintahan desa. Perangkat desa

lebih memilih untuk menjaga hubungan kekeluargaan untuk menghindari semaksimal mungkin perselisihan dan hal-hal yang menimbulkan konflik, terutama di lingkungan kerja pemerintah desa. Selain memperkuat solidaritas, hubungan kekerabatan juga memunculkan rasa tidak enak dalam setiap diri perangkat desa. Sisi positif adanya rasa tidak enak yaitu dapat meminimalisir terjadinya konflik di lingkungan kerja pemerintah desa. Sisi negatifnya, jika lingkungan kerja pemerintah desa memiliki kekerabatan, justru melemahkan kontrol satu sama lain. Kepala desa akan menjadi pusat pengaruh dan bawahan hanya mengikuti apa yang diinginkan oleh kepala desa. Di sisi lain, familisme semacam ini akan membuka ruang yang lebar terjadinya kongkalikong dan sulit mendeteksi penyelewengan anggaran desa di dalam pelaksanaan pemerintahan desa.

Berdasarkan dengan fakta yang ada dan didukung dengan teori akademik serta penelitian-penelitian yang relevan dapat diketahui bahwa konsep yang ada pada sebuah sistem pemerintahan tidak dapat dihapuskan dari sebuah pendapat politik dan

penerapan sistem pemerintah antara teori dengan praktik masih sangat jauh dan belum relevan diterapkan dimana masih banyak penyelewengan dan menyalah gunakan jabatan serta mengulur-ulur waktu apabila dalam pengurusan administrasi untuk masyarakat yang tidak mempunyai kerabat di struktur pemerintahan dan yang paling nampaknya ada di pedesaan, Jadi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dampak keberadaan familisme terhadap sistem pemerintah dapat membuat pembangunan desa terhambat dan kinerja perangkat desa tidak terawasi dengan baik serta sistem pemerintahannya menjadi tidak terkendali terkhusus dalam pelayanan publik yang belum memadai.

D. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini telah menjawab pertanyaan terkait sejauh mana kuatnya sistem kekerabatan di sistem pemerintah Desa dan bagaimana karakteristik kepemimpinan dalam pemerintahan di Desa. Dari uraian dan penjelasan yang sudah dijabarkan di atas, dapat disimpulkan bahwa fenomena politik familisme yang terjadi di Indonesia khususnya di pedesaan. Sistem

familisme semacam ini akan menimbulkan kecurigaan dari masyarakat, terutama terkait penggunaan anggaran desa yang begitu besar. Meskipun kekerabatan terjalin cukup kuat dalam struktur Desa akan tetapi dampak yang diberikan terhadap pembangunan desa dengan dibuktikan pelayanan dan pembangunan yang belum terealisasi serta kurangnya pemberian diri dalam melayani publik kepada masyarakat untuk pengurusan administrasi dan terkait penggunaan dana desa. Oleh karena itu peneliti berasumsi bahwa politik kekerabatan membuat banyak polemik dan banyak isu yang sangat berkembang serta teori yang selama ini dipelajari tidak relevan dengan praktik.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri, Andi, 2017, Kemerdekaan Dan Kedaulatan Rakyat Dalam Perspektif Mohammad
- Hatta Dan Islam, Jurnal Manthiq, Jurnal Filsafat Agama Dan Pemikiran
- Islam, Vol 2, No 2, 2017, <https://ejournal.lainbengkulu.ac.id/index.php/manthiq/article/view/668>
- Alam, R. H. (2018). Ikatan Kekerabatan dan Kedamaian Umat Beragama: Studi

- Kasus di Desa kertajaya Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. *Penamas*, Vol. 31, No. 2, 379–396.
- Amran, Limba, R. S., & Roslan, S. (2018). Dampak Pemilihan Kepala Daerah terhadap Hubungan Kekerabatan (Studi di Kecamatan Kabaena Timur Kabupaten Bombana). *Neo Societal*; Vol. 3, No. 1, 261-267.
- Anggariani, D. (2013). Politik Kekerabatan. *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 1 No.2, 1-8.djati
- Anggra, B. N., & Suryanef, S. (2022). Politik Kekerabatan dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Tanjung Pauh Mudik. *Perspektif*, Vol. 11, No. 3, 1230–1241.
- Bratakusumah, 2018, Actualization Of Checks And Balances Between Executive, Legislative And Judicial In Indonesia, *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, Vol li No. 3 - Dec 201, <https://Journal.Bappenas.Go.Id/Index.Php/Jpp/Article/Download/47/36/>
- Djati, W. R. (2013). Revivalisme Kekuatan Familisme Dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol 18, No 2, 209-211.
- Fadil. (2022, April 25). Sekretaris Karangtaruna Desa Lembang Lohe. (Salman, Interviewer)
- Garzon, A. (2000). Cultural Change And Familism. *Psicotema*, Vol.12.
- Hijjang, P., & Amelia, L. (2019). Assajingeng: Politik Kekerabatan di Pilkada Kabupaten Bone (Analisis Antropologi Politik). *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, Vol. 6, No. 2, 121-134.
- Mirsa, S. M., & Imran, M. (2023). Politik Kekerabatan Desa Barakkae Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone. *JSSHA ADPERTISI JOURNAL*, Vol. 2, No. 2 , 29–43.
- Moleong, L. J. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Noviati, 2013, Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013, <https://Jurnalkonstitusi.Mkri.Id/Index.Php/Jk/Article/Download/1027/106>
- Pahrudin. (2018). Dinasti Politik Pemerintah Desa di Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Arajang*, Vol. 1, No. 1, 36-44.
- Poma, M. D. (2016). Responsivitas Perangkat dalam pelayanan Administratif Kependudukan Desa Haya-Haya Kecamatan Limboto Barat

- Kabupaten Gorontalo. Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik, Vol. 3, No. 1, 1-10.
- Putra, H. S. (2017). Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Good Governance Di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri. Jurnal Politik Muda, Vol.6, No. 2, 110-119.
- Siswandani, D., & Prasetyo, K. B. (2022). Kuasa Jejaring Kerabat dalam Praktik Politik Lokal Pedesaan (Kajian Antroologi Politik). Umbara: Indonesian Journal of Anthropology, Vol. 7, No. 1, 50-60.
- Soemantri, Sri, 1976. Sistem-Sistem Pemerintahan Negara-Negara Asean. Transito Bandung
- Susan, M. H. (2017). Dinasti Politik dalam Pilkada Indonesia. Jurnal Of Government and Civil Society, Vol. 1 No. 2,, 111-119.
- Upe, A., Nur, M. J., & Suaib, E. (2022). Kontestasi Politik Kekerabatan dalam Pemilihan Kepala Desa: Konteks Masyarakat Bugis. Indonesian Annual Conference Series: 1st Conference on Social, Politics, and Culture (hal. 104-108). Kendari: IACS-CSPC.
- Yhasmid, N. F. (2020). Sistem Kekerabatan dan Literasi Politik Terhadap Kepemimpinan Pada Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Patampanua. DECISION : Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 1, No. 2, 111-120.
- Yusuf, M. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan. Jakarta: Kencana